



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023

2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana amanat Inpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910.05/Kep.360-Bappeda/2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggambarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini diharapkan SKPD senantiasa melakukan perbaikan dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2023 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Pw.02.02/416/Inspt.Irban III/2023 tanggal 27 Maret 2023, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(SAKIP) Tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan dengan hasil evaluasi sebesar 80,95 (dengan kategori A- Memuaskan). Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 80,55 (dengan kategori A- Memuaskan).

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta secara umum telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2023, dimana telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran tujuan strategis, 2 sasaran utama dan 7 indikator sasaran program. Berdasarkan hasil evaluasi Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (70%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu 2 indikator sasaran dan 1 indikator program. Penyebab indikator sasaran tidak mencapai target yaitu persentase kematian ibu dan bayi belum mencapai target, hal ini disebabkan meskipun jumlah kasus kematian ibu sama dengan tahun lalu tetapi adanya kenaikan target dan meningkatnya jumlah kelahiran hidup, serta belum terkendalinya 3 T (tiga terlambat) dalam penanganan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yaitu terlambat dalam pengambilan keputusan tingkat rujukan sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam stadium harus segera ditangani, terlambat dalam rujukan seperti transportasi pasien ke rumah sakit, baik dari rumah pasien, maupun antar klinik, rumah sakit/bidan desa ke rumah sakit serta penanganan di rumah sakit. Sedangkan 1 indikator program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya



Manusia Kesehatan dengan indikator Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar hanya mencapai 90%. Hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan pengangkatan baru untuk THL sedangkan rekrutment P3K hanya untuk alih tenaga dari non ASN menjadi ASN.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan. Melalui tujuan organisasi yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi meningkatkan umur harapan hidup yang sehat dan produktif sehingga dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa. Dimana diharapkan setiap penduduk di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan dengan strategi meningkatkan Ketersediaan Kualitas Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Lingkungan serta pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan pada tahun mendatang harus tetap diupayakan kepada usaha-usaha untuk menurunkan AKI dan AKB yang angkanya masih tinggi. Kekurangan dana kegiatan diharapkan dapat ditanggulangi melalui upaya mobilisasi dana seperti menjalin kemitraan dengan Badan Nasional maupun International melalui peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Di tingkat Kabupaten jalinan kemitraan juga perlu terus dikembangkan tidak hanya dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektoral, tetapi juga dengan



mengembangkan peran serta aktif masyarakat melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Selain itu, perlu dipertimbangkan pula peran swasta dan kelompok potensial di tingkat masyarakat agar berperan secara aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan sesuai bidangnya masing-masing sebagai wujud menuju kemandirian masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan selama tahun 2023, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kesehatan Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Purwakarta, 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**



dr. H. Dedi Darmawan, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 197509132006041008

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	I- 1
1.1. Latar Belakang	I- 1
1.2. Dasar Hukum	I- 2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	I- 5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	I- 7
1.5. Struktur Organisasi	I- 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II- 1
2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan Dinas Kesehatan	II- 1
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II- 3
2.3. Prioritas daerah	II-12
2.4. Penetapan Kinerja	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III- 1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III- 1
3.2. Penghargaan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	III- 6
3.3. Evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja	III- 8
Ringkasan Kinerja	III- 9
Rincian Kinerja	III-12
3.4. Realisasi Anggaran	III-93
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-102
3.6. Capaian Kinerja dan Target Jangka Menengah	III-112
BAB IV PENUTUP	IV- 1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dengan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP tersebut meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja; dan review dan evaluasi kinerja.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah urusan kesehatan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIP sejak tahun 2002 berdasarkan pada : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan pedoman



yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910.05/Kep.360-bappeda/2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Khusus dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan terbagi kedalam kelompok Urusan Utama dan Urusan Pendukung. Urusan Utama diartikan sebagai urusan pemerintahan yang menopang langsung terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Langkah Menuju Purwakarta Digjaya, sedangkan Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang mendukung upaya



pencapaian Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Langkah Mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kabupaten Purwokarta tahun 2018-2023 maka kesehatan berada pada misi pertama yaitu **Misi I: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**. Hal ini menjadikan kesehatan merupakan salah satu urusan utama Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Purwokarta dalam lima tahun kedepan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwokarta tahun 2018-2023 maka yang menjadi urusan kesehatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan obat esensial, program dan generik buffer stock
- b) Peningkatan pengawasan obat dan makanan
- c) Pemberantasan penyakit menular
- d) Meningkatkan status gizi masyarakat (bumil, bayi dan balita)
- e) Promosi kesehatan
- f) Upaya kesehatan berbasis masyarakat
- g) Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- i) Penyehatan air dan pengamanan Limbah
- j) Penyehatan lingkungan
- k) Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya
- l) Penyediaan sarana dan prasarana menuju desa siaga
- m) Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Fasilitasi pelayanan kesehatan kerja
- n) Pembinaan, pengawasan, fasilitasi pengobatan tradisional
- o) Peningkatan kesehatan anak balita
- p) Peningkatan kesehatan Lansia
- q) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- r) Penyusunan standar akreditasi dan regulasi institusi kesehatan



- s) Peningkatan pelayanan kesehatan SDM rumah sakit dan laboratorium daerah
- t) Pengadaan sarana dan prasarana Rumah sakit serta laboratorium daerah
- u) Meningkatkan status akreditasi Puskesmas dan rumah sakit daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan dan Kewenangan yang ada, kebijakan peningkatan derajat Kesehatan dimana kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada dasarnya masalah kesehatan bersifat kompleks, tidak berdiri sendiri dan mempunyai keterkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan sendiri oleh dinas kesehatan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harus dilakukan secara lintas sektoral. Program yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan lintas OPD merupakan kegiatan yang dilakukan bersama OPD lain, kegiatan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan, dan kegiatan yang bersifat lintas batas dalam bidang kesehatan.

Kegiatan tersebut meliputi kegiatan lintas OPD, kerjasama dengan LSM/pihak swasta dan pemerintah antar kabupaten/kota, propinsi dan pusat, antara lain Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, PKK, rumah sakit, BPJS Kesehatan,) dan asuransi



kesehatan lainnya dan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Isu dan aspek strategis permasalahan kesehatan antara lain :

- 1) Masalah pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan
- 2) Masalah jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan kesehatan daerah
- 3) Masalah kesehatan pengembangan serta upaya kesehatan lainnya termasuk kesehatan lintas batas
- 4) Masalah gizi masyarakat meliputi: stunting dan penanganan gizi buruk, ketahanan pangan, pemanfaatan bahan pangan setempat, peningkatan gizi keluarga dan menu seimbang, peningkatan dan penguatan posyandu, lomba balita dan intervensi keluarga miskin dan balita di bawah garis merah (gizi buruk dan gizi kurang), penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA), kekurangan energi kronis (KEK), kesehatan gizi remaja dan wanita pekerja serta ibu hamil dan melahirkan
- 5) Masalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi: penyebarluasan informasi kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan media penyuluhan dengan berbagai media dan pembinaan/pemberdayaan masyarakat melalui bina suasana, percontohan kawasan sehat, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian penghargaan kepada kader kesehatan teladan, keluarga teladan, tokoh masyarakat, stake holder maupun media yang mendukung dan berperan dalam pengembangan dan pembangunan kesehatan
- 6) Masalah penyehatan lingkungan dan sanitasi meliputi: penanganan limbah industri, pencegahan, penanganan dan penanggulangan pencemaran, penyediaan air bersih pedesaan



- dan perkotaan, penanganan limbah medis, penanganan sampah, penyehatan lingkungan dan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan
- 7) Masalah penanggulangan penyakit meliputi: penanganan penyakit bersumber binatang, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit dan Bencana Alam, penanganan pasien dan isolasi penyakit di sarana pelayanan, pencegahan dan pengamatan penyakit di masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu/miskin, anak jalanan, terlantar dan gelandangan
 - 8) Masalah kemitraan pelayanan kesehatan meliputi : kerjasama kesehatan dengan lintas sektor dan profesi, penguatan kemitraan dengan stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemitraan dengan perusahaan swasta melalui CSR, kesehatan anak balita di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainya termasuk masyarakat dan kesehatan lansia di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainya termasuk masyarakat
 - 9) Masalah manajemen dan kebijakan kesehatan meliputi: penyelarasan pembangunan kesehatan dan daerah dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan, kursus, ijin belajar dan tugas belajar.
 - 10) Pemenuhan sarana prasarana serta sumber daya kesehatan, termasuk distribusi dan pemetaan pegawai, pemenuhan sementara dengan tenaga nonPNS, pengajuan dan optimalisasi DAK dan sumber anggaran lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 3 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 5 ayat (2) menyatakan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan diuraikan pada pasal 5 ayat (3) yaitu;

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
 1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
 2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
 3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
 2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas :
 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);



3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 5. pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
- d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

- a. Kepala:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset; dan
 - 2). Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terbagi dalam dua jenis meliputi ;
 1. UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini



adalah Puskesmas sebanyak 20 puskesmas

2. UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;

a) Laboratorium Kesehatan;

b) Perbekalan Kesehatan.

h. Jabatan Fungsional.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH DAN TUJUAN DINAS KESEHATAN

Berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Visi

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;

Visi : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**
Misi I : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**



- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 13 menyatakan Rensta Perangkat Daerah memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan RPJMD Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, maka tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta.



Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui upaya :

- 1). Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan.
- 2). Meningkatkan sumber daya kesehatan yang akuntabel, berkualitas, dan merata.
- 3). Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penguatan jejaring surveilans epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun penyakit yang berpotensi KLB, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
- 4). Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan untuk mendorong terwujudnya lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.
- 5). Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, peserta jaminan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehat dan produktif.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi

Sesuai dengan janji Kepala Daerah terpilih termaktub dalam **“9 langkah melanjutkan Purwakarta Istimewa”** dimana kesehatan berada pada langkah kedua yaitu:

2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan Berbasis Online serta Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan



Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dari langkah tersebut maka upaya yang harus dilakukan dengan rincian langkah sebagai berikut:

1. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi
2. Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan
3. (Aplikasi) Berbasis Online dan
4. Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 maka strategi utama yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2018-2023 yaitu **“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi”**

Untuk mencapai strategi tersebut Dinas Kesehatan merumuskan dalam tahapan strategi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan puskesmas rawat inap secara bertahap
Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana bangunan,

sarana dan alat kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).

- 2) Penguatan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari *paradigma sakit menjadi paradigma sehat*. Sehingga pelayanan kesehatan dapat bergeser dari *pelayanan kuratif menjadi pelayanan promotif dan preventif* dengan tetap tidak meninggalkan pelayanan kuratif. Penguatan puskesmas juga didorong untuk menuju kemandirian puskesmas melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan puskesmas yang akuntabel, adaptif dan inovatif sehingga



memberikan mandat Puskesmas dapat untuk mengembangkan diri secara sehat, fleksibel dan mandiri dengan menggali seluruh potensi dan sumber daya di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

3) Pengembangan upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan

Pelayanan primer dan rujukan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan dan tuntutan perkembangan masyarakat maka perlu upaya pengembangan pelayanan dasar dan rujukan yang *up to date* sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya yang tersedia. Pengembangan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengembangan puskesmas

4) Perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan upaya memberikan perlindungan masyarakat dari kemungkinan terserang atau resiko yang lebih besar dari penyakit melalui upaya pencegahan, pengendalian, pengurangan/ eliminasi dan pemberantasan/eradikasi. Upaya yang dilakukan melalui preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative melalui imunisasi, penyelidikan dan surveilan epidemiologi, penanganan KLB dan pengendalian terhadap sumber penularan dan pengobatan kepada masyarakat yang terinfeksi. Upaya tersebut diharapkan dapat memutuskan mata penularan penyakit sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan bebas dari penyakit yang menular maupun tidak menular. Namun demikian, peran serta masyarakat dan masih adanya

sumber, agent dan media penularan dapat memungkinkan terjadinya penularan kembali di masyarakat. Di sisi lain, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat serta perubahan lingkungan mendorong timbulnya penyakit baru termasuk penyakit tidak menular dan degeneratif. Untuk itu, upaya perlindungan kesehatan harus diikuti kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dari penyakit melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat dan mengikuti petunjuk tenaga kesehatan serta berolahraga secara teratur. Dengan upaya tersebut akan mengurangi dan terhindar dari terkena resiko penyakit.

5) Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kualitas daya dukung lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan kesehatan sesungguhnya merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan apabila terjadi masalah lingkungan maka akan berdampak pada masalah kesehatan seperti kerusakan ekosistem dan habitat vektor penyakit, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, banjir, longsor dan kerusakan hutan akan menyebabkan penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Untuk itu upaya menciptakan kawasan lingkungan sehat, keseimbangan beban lingkungan dengan penduduk, penataan kawasan lingkungan sesuai tata ruang dan pencegahan dampak lingkungan akan mendukung peningkatan kualitas daya dukung lingkungan.

6) Peningkatan kapasitas tenaga dan sarana pelayanan kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau harus didukung dengan kemampuan tenaga dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di lingkup dinas kesehatan dan jaringannya. Kemampuan tenaga bukan hanya tenaga kesehatan tetapi juga tenaga non kesehatan yang bekerja di dinas kesehatan dan jaringannya untuk meningkatkan dedikasi, keahlian dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Kualitas tenaga harus didukung kemampuan dan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan layak baik bangunan, alat, obat dan sarana penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

7) Pemberdayaan masyarakat dan dukungan stake holder dan lintas sektor, melalui peningkatan peran serta masyarakat menuju kemandirian dalam bidang kesehatan, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan desa siaga sehat.

Peningkatan derajat kesehatan merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, dukungan stake holder dan lintas sektor.

Masyarakat bukan hanya objek tetapi sekaligus subjek pembangunan kesehatan akan menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu peran serta masyarakat menjadi suatu keharusan dalam untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.



Peran dan dukungan lintas stake holder dan lintas sektor sangat penting, karena masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi tanggung jawab semua pihak, dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, seringkali masalah kesehatan bukan masalah hulu tetapi muara atau hilirnya dari permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti sosial, ekonomi, kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut perlu diselesaikan masalah di hulunya, sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan di hilirnya. Perubahan perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan pekerjaan yang “tidak sekali jadi” tetapi membutuhkan ketekunan, konsistensi, inovasi dan teladan yang nyata di lapangan. Hal ini disebabkan perubahan perilaku membutuhkan waktu yang relatif panjang bisa lima, sepuluh tahun atau lebih dan tidak boleh pantang menyerah. Tetapi perubahan perilaku dapat berubah secara cepat apabila perilaku tersebut telah menjadi trend atau gaya hidup. Hal ini akan terasa terutama pada kelompok generasi muda dan perkotaan atau modern. Sedangkan pada kelompok masyarakat pedesaan tradisional dapat terjadi perubahan apabila telah merasakan manfaat atau melihat kelompok atau tokohnya telah menggunakan/ melakukannya. Untuk itu dalam mendorong masyarakat ber-PHBS maka pemberdayaan masyarakat tersebut harus dapat mendorong PHBS sebagai trend dan pendekatan asas manfaat dan tokoh atau faktor kunci (key person atau

stakeholder) di masyarakat harus terus dilakukan dengan berbagai upaya inovasi, konsistensi dan keberlanjutan program harus digalakan.

Desa siaga sehat merupakan sinergitas dari berbagai program kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat. Program yang berkaitan dengan konsep pelayanan hingga tingkat desa antara lain desa sehat yang dikembangkan oleh penyehatan lingkungan, desa Perilaku Hidup bersih dan sehat yang dikembangkan oleh promosi kesehatan dan desa siaga yang merupakan gabungan dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, surveilans epidemiologi dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat sasaran dan objek kegiatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat desa serta kepentingan yang relatif sama maka perlu mensinergikan program tersebut dalam suatu wadah yang sama. Maka dengan penyatuan kegiatan dalam pengembangan desa siaga sehat dapat lebih mensinergikan kegiatan tersebut dapat efektif dan efisien. Untuk itu peran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan.

8) Pengembangan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi seseorang sakit dan



membutuhkan pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya yang besar. Sementara pada saat tersebut biaya pelayanan kesehatan menjadi *konsumtif* dan tidak menjamin bahwa dia akan betul-betul sembuh dan tidak akan sakit lagi sehingga pernyataan kesehatan sebagai investasi menjadi suatu *anomali*.

Pada masyarakat miskin, pemerintah telah menjamin dengan adanya jaminan kesehatan sehingga beban pelayanan kesehatan akan berpindah masyarakat yang sedikit diatas miskin. Dan masyarakat ini rentan menjadi miskin apabila tidak terlindungi asuransi atau jaminan kesehatan. Pada sisi lain dengan adanya jaminan kesehatan dapat mendorong produktifitas masyarakat karena tidak perlu biaya pengobatan apabila sakit karena telah dijamin oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat mendorong pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, terciptanya standar pelayanan kesehatan yang tidak membedakan status sosial, dan tidak adanya kasus penolakan oleh rumah sakit atau ketidakmampuan masyarakat membayar pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi bertahap sesuai kemampuan pembiayaan dari anggaran daerah

maupun pusat serta kesiapan masyarakat seperti perilaku masyarakat dalam berobat dan pembayaran premi atau iur biaya bila akan dikenakan pembebanan kepada masyarakat serta struktur organisasi maupun mekanisme pengelolaan jaminan kesehatan tersebut.

- 9) Penyusunan perencanaan, kajian dan regulasi pembangunan kesehatan berdasarkan masalah dan potensi daerah, isu strategis dan kebijakan pembangunan baik global, nasional, regional maupun lokal kabupaten.

Perkembangan kesehatan yang semakin kompleks, dinamis dan maju menyebabkan organisasi Dinas Kesehatan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan tersebut. Untuk itu perlunya adanya perencanaan yang terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Selain itu, perlu selalu mengadaptasi terhadap setiap perubahan melalui kajian yang komprehensif dan rasional sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan kesehatan maupun isu strategis baik dalam skala global (dunia), nasional, regional (propinsi atau kewilayahan) maupun kabupaten. Dalam penerapan pelayanan kesehatan yang semakin pesat berkembang perlu didukung regulasi kesehatan yang akuntabel untuk menjadi payung hukum dan perlindungan dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

2.3. PRIORITAS DAERAH

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan



pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami perubahan terkait nomenklatur program dan kegiatan serta adanya menu sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

2.4. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwokerto tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rangka mewujudkan

target kinerja. Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, Program-program dan kegiatan serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran dalam upaya pencapaian Visi dan Misi organisasi yang selengkapny dapat dilihat pada Tabel Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Indeks	71,24
B	Sasaran utama			
	Meningkatnya akseibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Persentase kematian ibu	%	0,09
		2 Persentase kematian bayi	%	0.41
C	Sasaran Program:			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	85

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	80
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar	%	100
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	65.16



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2023 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari LAKIP merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja

diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang baik laporan kegiatan rutin meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan,

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2023 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2023



tidak dilakukan pengukuran, mengingat adanya perubahan regulasi terkait dengan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian sasaran rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) atau dampak (*impacts*). Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat



menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 – 2023.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2023.

3.2. Penghargaan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Tabel 3.1
Penghargaan/Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1.	Penghargaan UHC Award atas dukungan dan kontribusi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan pencapaian Universal Health Coverage	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Kabupaten Purwakarta
2	Penghargaan Respons Imunisasi Terbaik dalam pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio Provinsi Jawa Barat	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Kabupaten Purwakarta
3	Penghargaan dengan inovasi MITRA TB atas partisipasinya dalam lomba inovasi daerah kabupaten Purwakarta tahun 2023	Bupati Purwakarta	Dinas Kesehatan
4	Penghargaan Kabupaten dengan Capaian PPM Terbaik 3 dalam acara Monitoring dan Evaluasi Program TBC Tahun 2023	Gubernur Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta
5	Penghargaan dalam capaian kabupaten terinovasi Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Program TBC, Implementasi PPM dan Manajemen Kohart TBC RO Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta
6	Sertifikat Terakreditasi sebagai Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi jabatan Fungsional Kesehatan	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Dinas Kesehatan
7	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Koncara

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
8	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Plered
9	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Pasawahan
10	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Tegalwaru
11	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Kiarapedes
12	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Maniis
13	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Bojong
14	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Sukasari
15	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Pondoksalam
16	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Sukatani
17	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Campaka
18	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Maracang
19	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Cibatu



No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
20	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Wanayasa
21	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Bungursari
22	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Munjuljaya
23	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Darangdan
24	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Jatiluhur
25	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Purwakarta
26	Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan republik Indonesia	Puskesmas Mulyamekar

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Pw.02.02/416/Inspt.Irban III/2023 tanggal 27 Maret 2023, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan dengan hasil evaluasi sebesar 80,95 (dengan kategori A-

Memuaskan). Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 80,55 (dengan kategori A- Memuaskan).

Ringkasan Kinerja

Pencapaian sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 - 2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disajikan pada grafik 3.1 sebagai berikut :

:

Tabel 3.2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan, Sasaran Utama dan Sasaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
A	Tujuan						
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Indeks	71,24	71,24	100	
B	Sasaran utama						
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Persentase kematian ibu	%	0,09	0,139	64,75	
		2 Persentase kematian bayi	%	0.41	0,686	59,77	
C	Sasaran Program :						
1	Program Penunjang Urusan	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB	A	100	Menunggu hasil penilaian inspektorat



No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
	Pemerintahan Daerah	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	85	87	102,35	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	80	85	106,25	
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	100	90	90	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	100	100	100	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	65.16	72	110,65	

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis meliputi sasaran tujuan, sasaran utama dan sasaran program. Pada sasaran tujuan terdapat 1 (satu) indikator, sasaran utama terdapat 2 (dua) indikator dan sasaran program terdapat 7 (tujuh) indikator, sehingga terdapat 10 (sepuluh) indikator yang diukur dalam penilaian kinerja di Dinas Kesehatan.



Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (100%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu 2 indikator sasaran dan 1 indikator program. Penyebab indikator sasaran tidak mencapai target yaitu persentase kematian ibu dan bayi belum mencapai target, hal ini disebabkan meskipun jumlah kasus kematian ibu sama dengan tahun lalu tetapi adanya kenaikan target dan meningkatnya jumlah kelahiran hidup, serta belum terkendalinya 3 T (tiga terlambat) dalam penanganan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yaitu terlambat dalam pengambilan keputusan tingkat rujukan sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam stadium harus segera ditangani, terlambat dalam rujukan seperti transportasi pasien ke rumah sakit, baik dari rumah pasien, maupun antar klinik, rumah sakit/bidan desa ke rumah sakit serta penanganan di rumah sakit. Penyebab lainnya yaitu sangat kompleksnya penanganan kasus kematian ibu dan bayi. Selain itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat, anggaran yang belum memadai, serta data pelaporan yang belum optimal.

Sedangkan 1 indikator program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar hanya mencapai 90%. Hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan pengangkatan baru untuk THL sedangkan rekrutment P3K hanya untuk alih tenaga dari non ASN menjadi ASN.

Rincian kinerja

Tahun 2023 adalah tahun kelima implementasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023, Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun 2023;

Tujuan dan Sasaran Utama:

Adapun tujuan Dinas Kesehatan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas”

Hasil capaian tujuan dan sasaran pada Renstra sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan dan Sasaran Utama
Dinas Kesehatan Tahun 2022- 2023

No	Indikator	2022			2023		
		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian
	Tujuan :						
	Umur harapan hidup	70,68	71,18	100,71	71,24	71,24	100
	Sasaran :						
1	Persentase kematian ibu	0,11	0,148	74,32	0,09	0,139	64,75

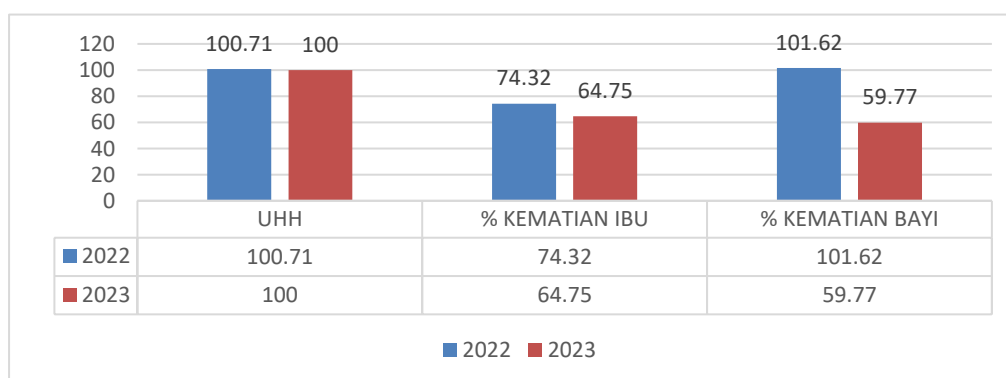
2	Persentase kematian bayi	0,440	0,433	101,62	0.41	0,686	59,77
---	--------------------------	-------	-------	--------	------	-------	-------

Berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran utama, dari dua indikator tersebut, kematian ibu dan bayi belum mencapai target.

Hal ini terlihat meskipun kematian ibu masih belum mencapai target, tetapi telah mengalami penurunan dari 0,148% menjadi 0,139%. Dan apabila dikonversi angka nasional perseratus ribu kelahiran hidup menjadi turun dari 148 perseratus ribu kelahiran hidup menjadi 139 perseratus ribu kelahiran hidup yang dilaporkan. Sedangkan kematian bayi menunjukkan peningkatan kasus dari 0,433% menjadi 0,686 %.

Adapun perkembangan 3 indikator utama Dinas Kesehatan tahun 2022-2023 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022- 2023



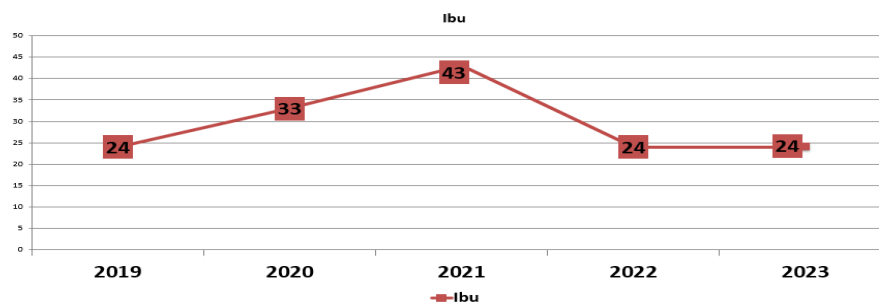


Dari grafik tersebut menunjukkan adanya upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian kinerja utama untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan kasus kematian ibu tercatat tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 24 kasus. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2

**Trend Kematian Ibu
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2019-2023

Penyumbang kematian ibu tertinggi tahun 2023 disebabkan Pendarahan 7 kasus, gangguan hipertensi 5 kasus dan Komplikasi Non Obstetrik 5 kasus, Infeksi 1 kasus, Abortus 1 kasus, Komplikasi Obstetrik 1 kasus, lain-lain 4 kasus. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.3
Penyebab Kematian Ibu Maternal
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan 2023



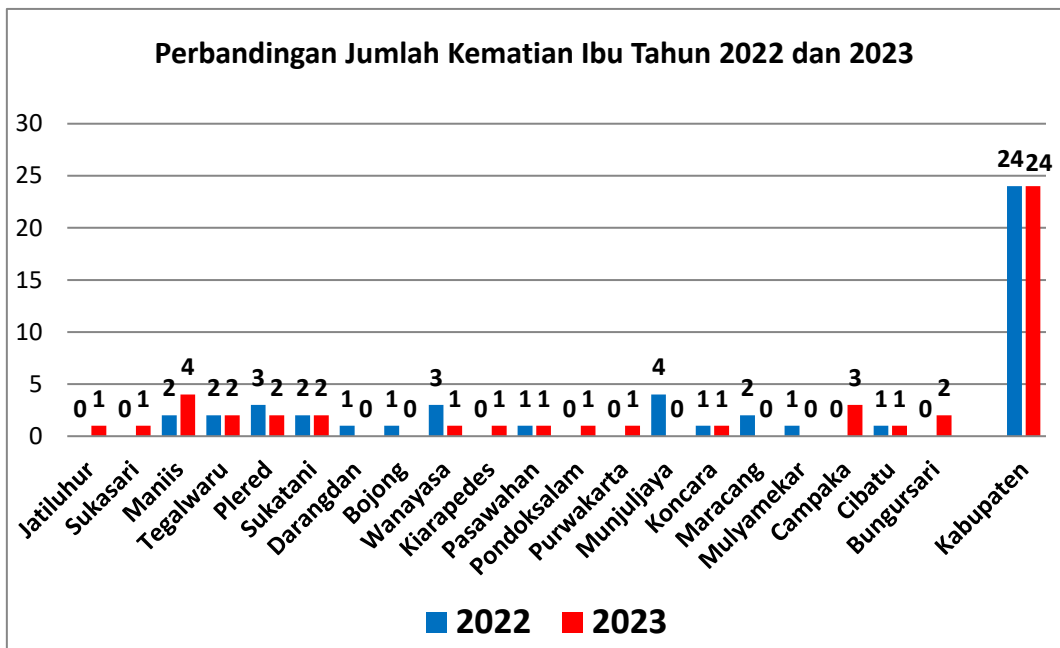
Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan pemetaan kasus kematian ibu menunjukkan Puskesmas Maniis paling tinggi dan meningkat pada tahun 2023, dimana tercatat sebanyak 2 kasus tahun 2022 meningkat menjadi 4 kasus tahun 2023. Puskesmas yang lain yang mengalami peningkatan lainnya adalah Puskesmas Jatiluhur, Sukasari, Kiarapedes, Pondoksalam, Purwakarta, Campaka dan Bungursari. Sedangkan puskesmas yang lainnya mengalami penurunan dan tetap. Adapun Puskesmas yang tetap sama dengan 2022 yaitu Puskesmas Tegalwaru dan sukatani masing-masing sebanyak 2 kasus, Puskesmas Pasawahan, Koncara dan Cibatu masing-masing 1 kasus. Penurunan kasus tertinggi kematian ibu tahun 2022-2023 yaitu Puskesmas Plered dari 3 kasus menjadi 2 kasus, Darangdan dari 1 kasus menjadi 0 kasus dan Puskesmas Jatiluhur dari 4 kasus menjadi 0 kasus, Darangdan dan Bojong masing-masing dari 1 kasus menjadi 0 kasus, wanayasa dari 3 kasus menjadi 1 kasus, Munjuljaya dari 4 kasus menjadi 0, Maracang dari 2 kasus menjadi 0 kasus dan



Mulyamekar dari 1 kasus menjadi 0 kasus. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Perbandingan Kematian Ibu Antar Puskesmas di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023



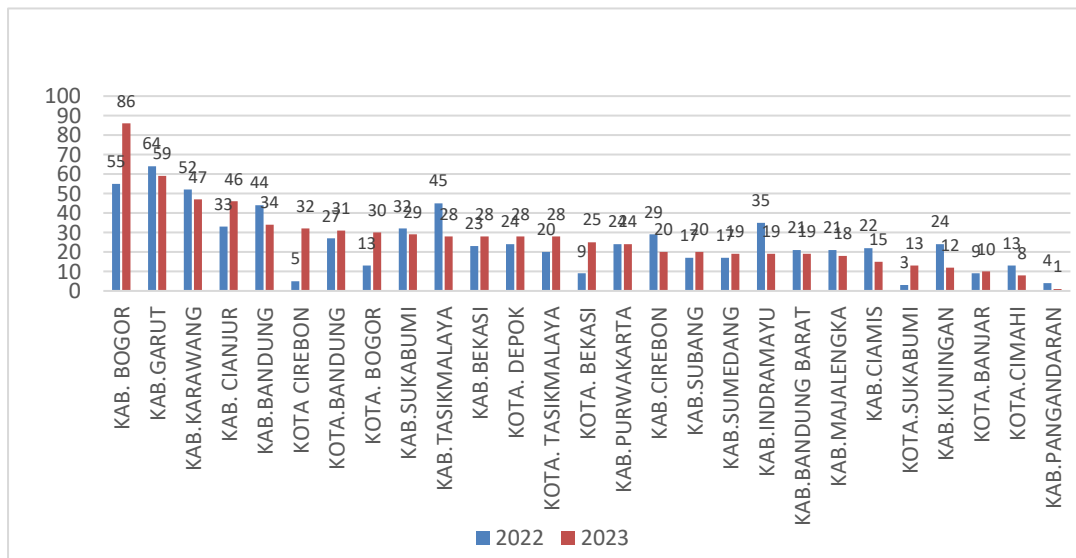
Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Berdasarkan data kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kabupaten Purwakarta berada di kelompok tengah yaitu pada lima belas besar kabupaten yang memiliki kematian ibu cukup tinggi, sedangkan apabila dilihat dari kelompok kematian terendah Kabupaten Purwakarta berada pada urutan 12 tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan wilayah terdekat seperti Kabupaten Subang, Karawang, Bandung Barat dan Cianjur, maka Kabupaten Purwakarta lebih rendah dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur, dimana Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 47 kasus dan

Kabupaten Cianjur 46 kasus. Tetapi apabila melihat penurunan kasus maka Kabupaten Karawang penurunan kasus sebanyak 5 kasus (9.62%), sedangkan Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan kasus sebanyak 13 kasus (39,39%) dan Kabupaten Purwakarta berada diposisi sama dengan tahun 2022 tidak ada kenaikan.

Data jumlah kematian ibu di Jawa Barat tahun 2023 sebanyak 729 kasus meningkat dari 685 kasus tahun 2022, dengan kasus kematian ibu tertinggi tahun 2023 yaitu Kabupaten Bogor sebanyak 84 kasus dan tahun 2022 yaitu Kabupaten Garut sebanyak 64 kasus. Sedangkan kasus terendah Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 kasus dan tahun 2022 Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 kasus. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

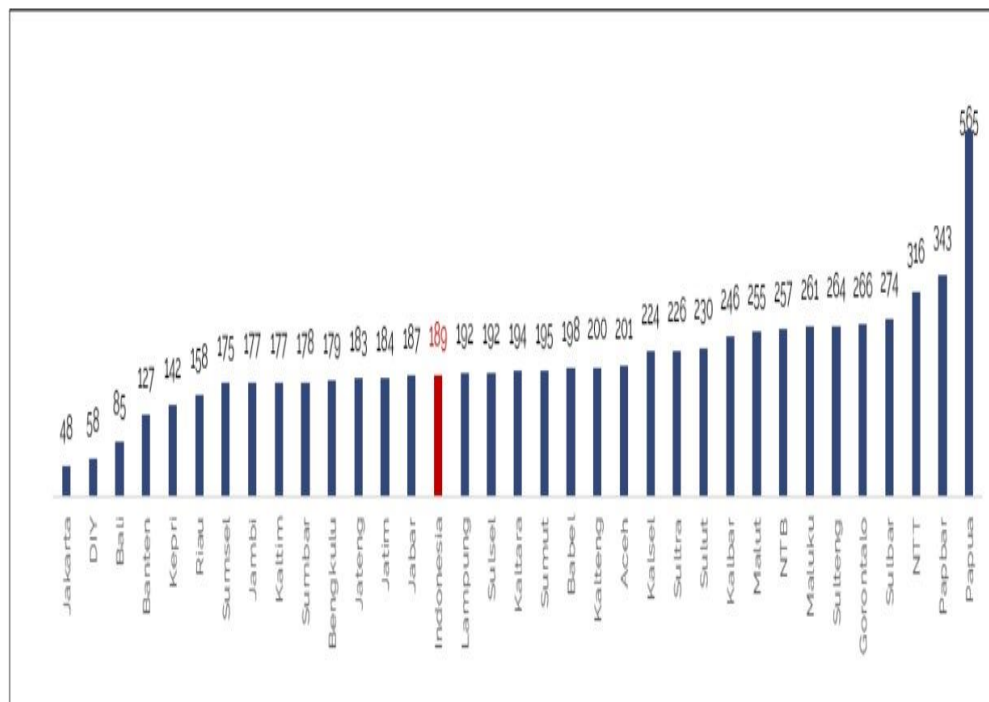
Grafik 3.5
Perbandingan Kematian Ibu di Kabupaten Purwakarta
dengan Kabupaten/Kota Lainnya
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, menunjukkan hasil Long Form SP2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Barat sebesar 187 yang artinya terdapat 187 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas dari 100.000 kelahiran hidup, AKI Jawa Barat di bawah dari AKI Nasional (189/100.000 KH). Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6
Perbandingan AKI Provinsi Jawa Barat dan antar Provinsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

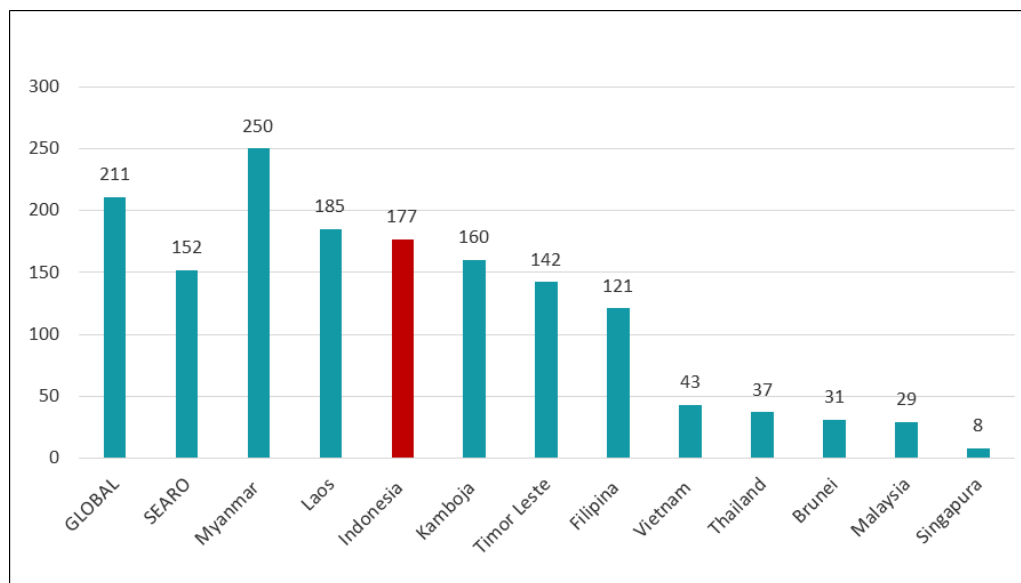
Dengan melihat data diatas, bahwa AKI Provinsi Jawa Barat sebesar 187 dan AKI Nasional 189, kasus kematian ibu di Kabupaten Purwakarta dan apabila dikonversi angka nasional



perseratus ribu kelahiran hidup tercatat sebesar 148 perseratus ribu kelahiran hidup yang dilaporkan. Sehingga kasus kematian ibu di Kabupaten Purwakarta masih dibawah AKI Nasional dan AKI Jawa Barat.

Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan 177/100.000 KH jumlah kematian Ibu pertahun. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.7
Angka Kematian Ibu Antara Indonesia dan Negara-Negara Lainnya di Asia Tenggara Tahun 2019



Sumber: Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. WHO, 2019. Diprediksi dg AKI 177/100.000 KH jumlah kematian Ibu pertahun:

Berdasarkan jumlah kematian ibu di Jawa Barat tahun 2023, selain dianalisis berdasarkan jumlah kasus, maka perlu dilakukan analisis terhadap trend, persentase dan AKI yang dilaporkan. Hal ini dilakukan bahwa jumlah kasus yang tinggi tentu harus dilihat juga jumlah kelahiran hidup sebagai

pembagi(penyebut)nya serta kecenderungan (trend) dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta secara jumlah kasus tahun 2023 berada pada peringkat 15, tetapi berdasarkan persentase dan AKI yang dilaporkan berada pada peringkat 23 atau 5 terbawah sedangkan apabila apabila trend kenaikan dan penurunan berada pada peringkat 18 dan persentase trend kenaikan berada pada peringkat 16. Hal ini terlihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.4
Analisis Perbandingan Kasus Kematian Ibu, Trend, Persentase dan AKI yang dilaporkan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten/Kota Lainnya Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/ Kota	2023	2022	Trend +/-	% Trend Kenaikan	Kelahiran Hidup Thn 2023	% Kematian Ibu Thn 2023	AKI yang dilaporkan
1	Kab. Bogor	86	55	31	56,36	112.305	0,077	77
2	Kab.Garut	59	64	5	7,81	47.131	0,125	125
3	Kab.Karawang	47	52	5	9,62	37.601	0,125	125
4	Kab. Cianjur	46	33	13	39,39	38.845	0,118	118
5	Kab.Bandung	34	44	10	22,73	67.114	0,051	51
6	Kota Cirebon	32	5	27	540	4.794	0,668	668
7	Kota.Bandung	31	27	4	14,81	37.277	0,083	83
8	Kota. Bogor	30	13	17	130,77	17.592	0,171	171
9	Kab.Sukabumi	29	32	3	9,38	41.421	0,070	70
10	Kab.Tasikmalaya	28	45	17	37,78	26.767	0,105	105
11	Kab.Bekasi	28	23	5	21,74	77.165	0,036	36
12	Kota. Depok	28	24	4	16,67	43.673	0,064	64
13	Kota. Tasikmalaya	28	20	8	40	10.619	0,264	264
14	Kota. Bekasi	25	9	16	177,78	49.975	0,050	50
15	Kab.Purwakarta	24	24	0	0	16.151	0,149	149
16	Kab.Cirebon	20	29	9	31,03	33.495	0,060	60
17	Kab.Subang	20	17	3	17,65	21.818	0,092	92
18	Kab.Sumedang	19	17	2	11,76	16.169	0,118	118

19	Kab.Indramayu	19	35	16	45,71	24.760	0,077	77
20	Kab.Bandung Barat	19	21	2	9,52	28.422	0,067	67
21	Kab.Majalengka	18	21	3	14,29	17.266	0,104	104
22	Kab.Ciamis	15	22	7	31,82	15.698	0,096	96
23	Kota.Sukabumi	13	3	10	333,33	5.259	0,247	247
24	Kab.Kuningan	12	24	12	50	16.000	0,075	75
25	Kota.Banjar	10	9	1	11,11	2.683	0,373	373
26	Kota.Cimahi	8	13	5	38,46	9.600	0,083	83
27	Kab.Pangandaran	1	4	3	75	5.276	0,019	19
	Total Kasus	729	685			824.876		
	Rata-Rata Kasus	27	25	44	6,42	30551	0,088	

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (data diolah), Tahun 2023

Dengan melihat hal diatas, bahwa kematian ibu masih menjadi masalah prioritas yang harus ditangani, karena meskipun stabil tidak mengalami kenaikan, tetapi masih diatas rata-rata kasus Jawa Barat, dan cenderung ada di kelompok tengah dan bawah pada kasus kematian ibu di Jawa Barat.

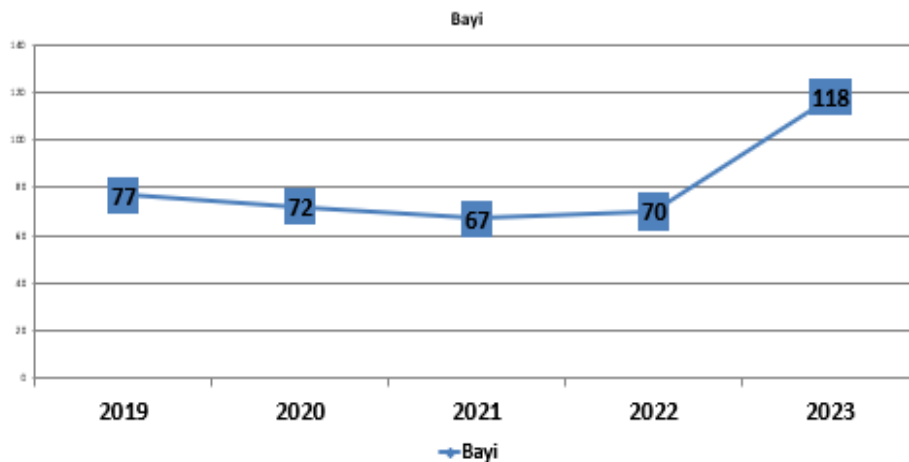
Permasalahan kematian ibu merupakan masalah yang kompleks baik dari sisi internal maupun eksternal. Permasalahan internal seperti pelayanan kesehatan, sarana dan sumber daya manusia kesehatan yang belum merata baik dari jumlah, jenis dan mutunya, pembiayaan yang belum optimal, pendataan dan penyisiran data sasaran yang belum maksimal. Sedangkan dari masalah eksternal antara lain perilaku ibu bersalin, dukungan keluarga dan masyarakat termasuk perencanaan kehamilan dan persalinan serta dukungan lintas sektor. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Selanjutnya terkait kasus kematian bayi menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan empat tahun yang sebelumnya. Dimana tahun 2023 tercatat sebanyak 118 kasus, meningkat



dibandingkan tahun 2021-2022. Kematian bayi didukung masih tingginya bayi neonatal sebanyak 104 kasus dan postneonatal 14 kasus mengalami kenaikan sebanyak 5 kasus dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 9 kasus. Trend yang positif yaitu penurunan kasus kematian bayi, dimana tahun 2021 tercatat sebanyak 67 kasus menurun dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian dan analisis lebih lanjut masih tingginya kematian bayi tersebut. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.8
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 s/d 2023

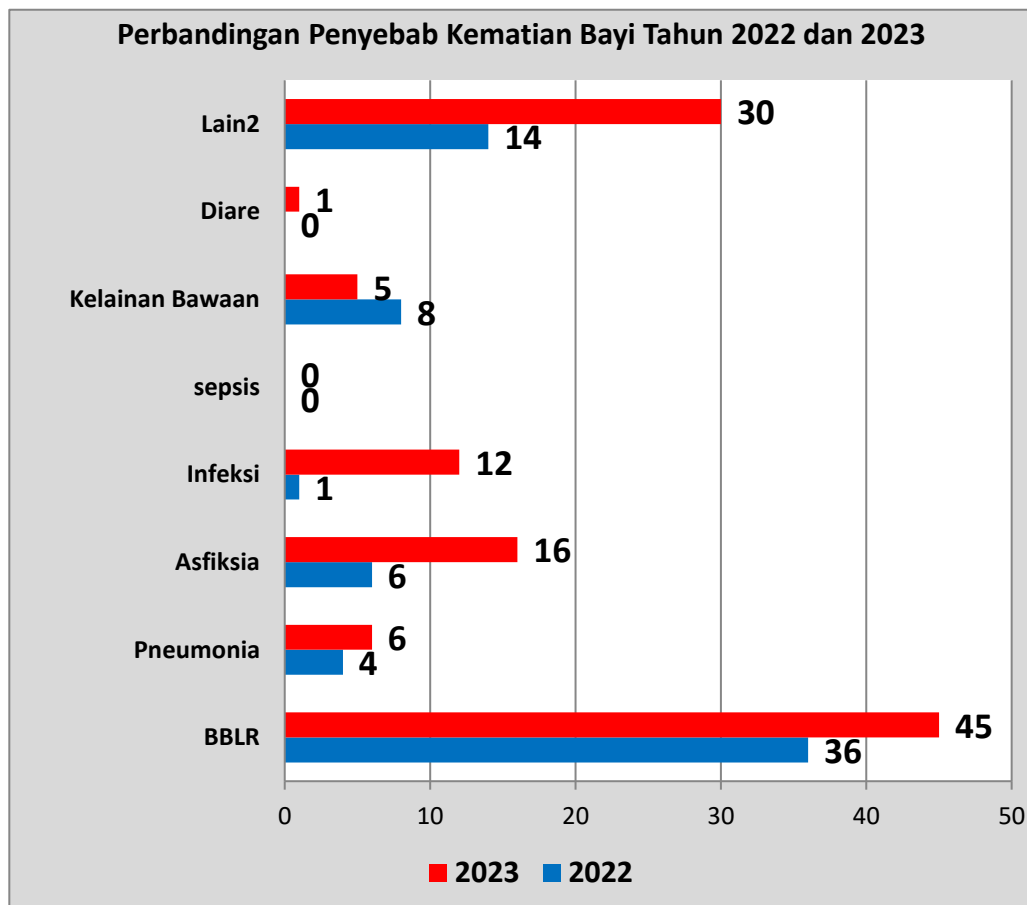


Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan penyebab kematian bayi tahun 2022-2023 menunjukkan kematian tertinggi disebabkan pemicunya adalah BBLR dan Prematuritas BBLR dimana tercatat sebanyak sebanyak 36 kasus tahun 2022 meningkat menjadi 45 kasus tahun 2023. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.9
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022-2023

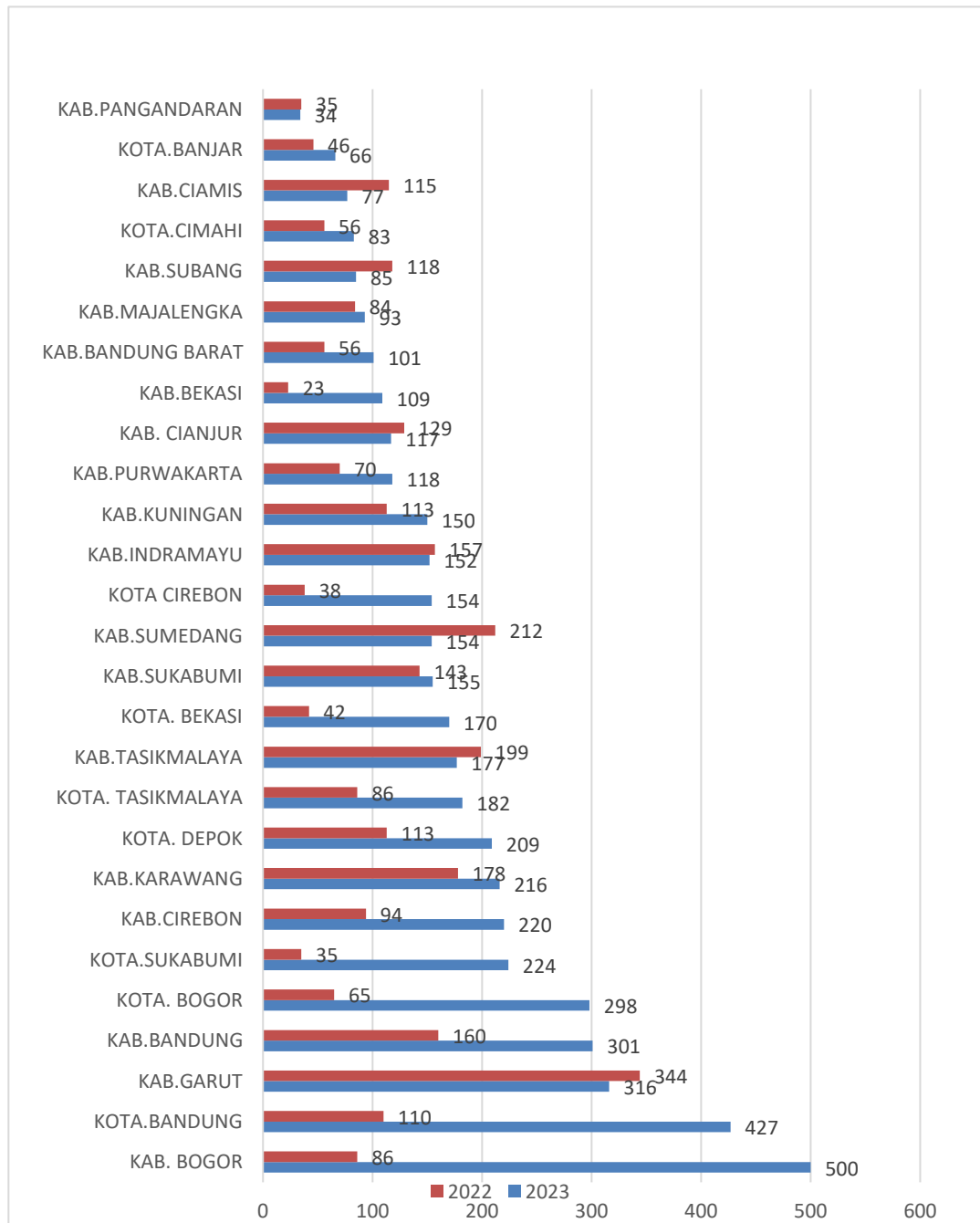


Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2022-2023

Berdasarkan data kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kabupaten Purwakarta berada di kelompok tengah yaitu dilihat dari kelompok kematian terendah berada pada urutan 10 tahun 2023 dan urutan 10 tahun 2022. Data jumlah kematian bayi di Jawa Barat tahun 2023 sebanyak 4888 kasus, dengan kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Bogor sebanyak 500 kasus meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 86 kasus, dan terendah Kabupaten Pangandaran sebanyak 34

kasus meurun dari 1 kasus tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini

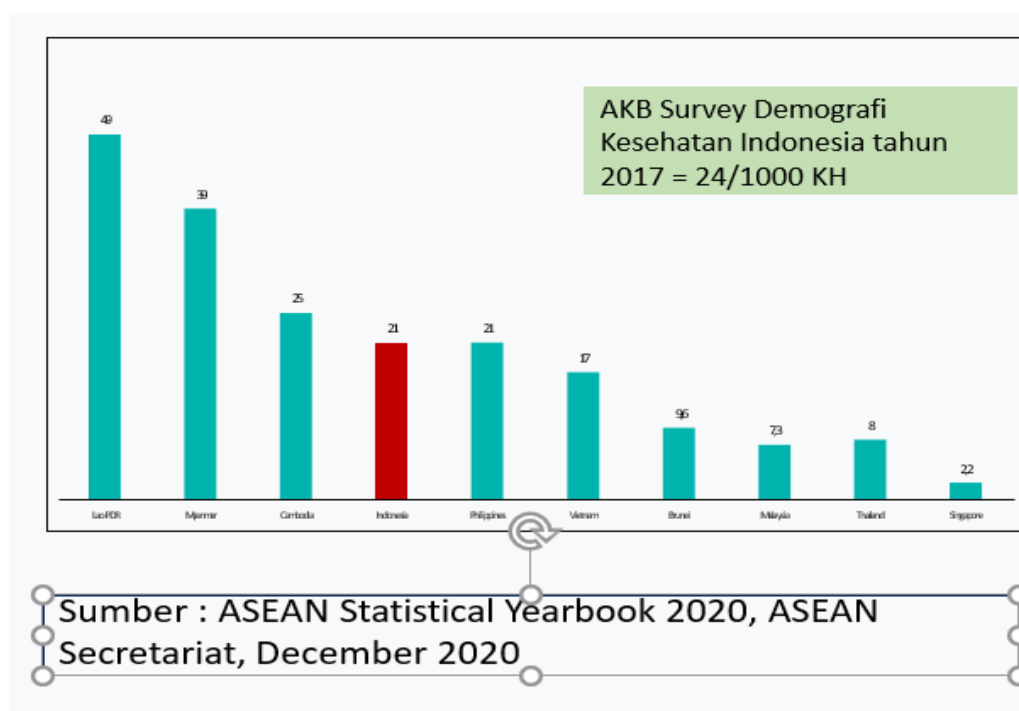
Grafik 3.10
Jumlah Kematian Bayi Per Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Apabila melihat Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan 21/1.000 kelahiran hidup dan berada pada urutan keempat diantara negara-negara Asia Tenggara. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.11
Angka Kematian Bayi (AKB) Antara Indonesia dan Negara-Negara Lainnya di Asia Tenggara Tahun 2020



Sedangkan AKB di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tercatat menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,56 per 1.000 kelahiran hidup selama satu dekade terakhir. Di Bawah AKB Nasional (16,85 per 1.000 KH).

Dengan melihat data di atas maka Kabupaten Purwakarta apabila dibandingkan dengan data Provinsi Jawa Barat berada 4,33 perseribu berdasarkan kematian bayi yang dilaporkan, sehingga berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan angka nasional. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Analisis Perbandingan Kasus, Trend dan Persentase
Trend Kenaikan, Persentase Kematian Bayi dan AKB yang
dilaporkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023

Kab/Kota	2023	2022	Trend	% Trend Kenaikan	Kelahiran Hidup Tahun 2023	% Kematian Bayi Tahun 2023	AKB yang dilaporkan Tahun 2023
			+/-				
Bekasi	109	23	86	373.913	77165	0.141	1.41
Pangandaran	34	35	-1	-2.857	5276	0.644	6.44
Kota Sukabumi	224	35	189	540.000	5259	4.259	42.59
Kota Cirebon	154	38	116	305.263	4794	3.212	32.12
Kota Bekasi	170	42	128	304.762	49975	0.340	3.40
Kota Banjar	66	46	20	43.478	2683	2.460	24.60
Bandung Barat	101	56	45	80.357	28422	0.355	3.55
Kota Cimahi	83	56	27	48.214	9600	0.865	8.65
Kota Bogor	298	65	233	358.462	17592	1.694	16.94
Purwakarta	118	70	48	68.571	16151	0.731	7.31
Majalengka	93	84	9	10.714	17266	0.539	5.39
Bogor	500	86	414	481.395	112305	0.445	4.45
Kota Tasikmalaya	182	86	96	111.628	10619	1.714	17.14
Cirebon	220	94	126	134.043	33495	0.657	6.57
Kota Bandung	427	110	317	288.182	37277	1.145	11.45
Kota Depok	209	113	96	84.956	43673	0.479	4.79
Kuningan	150	113	37	32.743	16000	0.938	9.38
Ciamis	77	115	-38	-33.043	15698	0.491	4.91
Subang	85	118	-33	-27.966	21818	0.390	3.90
Cianjur	117	129	-12	-9.302	38845	0.301	3.01
Sukabumi	155	143	12	8.392	41421	0.374	3.74
Indramayu	152	157	-5	-3.185	24760	0.614	6.14
Bandung	301	160	141	88.125	67114	0.448	4.48
Karawang	216	178	38	21.348	37601	0.574	5.74
Tasikmalaya	177	199	-22	-11.055	26767	0.661	6.61
Sumedang	154	212	-58	-27.358	16169	0.952	9.52
Garut	316	344	-28	-8.140	47131	0.670	6.70
Jawa Barat	4888	2907			824876		
Rata2 Kasus	181.037	107.67					

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (data diolah), Tahun 2022-2023

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa peringkat kasus berada di urutan 10, trend kenaikan adanya peningkatan kasus sebanyak 48 kasus meningkat dari tahun sebelumnya dengan % trend kenaikan 68,571%, % kematian bayi 0,731% dengan AKB dari kasus bayi yang dilaporkan sebesar 7,31 perseribu kelahiran hidup.

Selanjutnya terhadap evaluasi indikator sasaran program terdapat 7 indikator pada 5 Program berdasarkan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwokarta dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 serta Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan terdapat semua indikator telah mencapai target yang diharapkan, bahkan terdapat 6 indikator yang capaiannya diatas 100%. Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang berada pada sasaran program sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Pengukuran Pencapaian Sasaran Program
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB	A	100	Menunggu hasil penilaian inspektorat
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	85	87	102,35	



No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	80	85	106,25	
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	100	90	90	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	100	100	100	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	65.16	72	110,65	

Deskripsi sasaran :

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran menunjukkan dari 7 (tujuh) indikator telah mencapai target bahkan terdapat 4 indikator yang capaiannya diatas 100%. terdapat 4 indikator (57,14%) yang mencapai 100% keatas, 2 indikator mencapai 100%. Dan masih ada 1 indikator yang harus diupayakan dengan maksimal untuk meningkatkan

kinerja Dinas Kesehatan, sehingga dapat mencapai target tersebut.

Hasil capaian indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	URAIAN	Layanan SPM			Capaian SPM (80%)	Mutu (20%)	Capaian IP-SPM	Kategori Indeks Pencapaian SPM
		Sasaran	Realisasi	%				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.766	17.474	98,36	78,69	19,75	98,44	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.959	16.609	97,94	78,35	19,79	98,14	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.151	16.151	100,00	80,00	20,00	100,00	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	78.020	71.157	91,20	72,96	18,42	91,38	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	143.607	143.607	100,00	80,00	20,00	100,00	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	621.023	504.008	81,16	64,93	20,00	84,93	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	108.372	82.841	76,44	59,22	18,43	79,58	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.532	67.812	96,14	76,91	19,81	96,72	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita	13.202	13.202	100,00	80,00	20,00	100,00	



NO	URAIAN	Layanan SPM			Capaian SPM (80%)	Mutu (20%)	Capaian IP-SPM	Kategori Indeks Pencapaian SPM
		Sasaran	Realisasi	%				
	Diabetes Melitus							
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.352	1.352	100,00	80,00	20,00	100,00	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	22.799	20.906	91,70	73,36	20,00	93,36	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	23.675	21.541	90,99	72,79	19,28	92,07	
	Cakupan SPM			93,5	74,8	19,6	94,55	

Sumber laporan SPM bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan hanya 4 jenis pelayanan yang mencapai target 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat serta terdapat 2 jenis pelayanan yang mendekati 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

Capaian yang masih rendah dan belum mencapai target, disebabkan jumlah sasaran yang sangat besar dan luas karena mencakup semua jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan cakupan luas tersebut, tentu membutuhkan strategi dan sinergitas dengan perangkat daerah lain, anggaran



yang terbatas sehingga masih refokusing anggaran, serta kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas, disebabkan masih terbatasnya rekrutmen tenaga ASN, sulitnya perpindahan tenaga dan kurangnya tenaga profesional non Kesehatan. Kebijakan lain terkait pemenuhan kebutuhan dan pengembangan SDM seperti tidak boleh menarik SDM dari puskesmas dengan pertimbangan tidak boleh beralih jabatan fungsional dari Puskesmas saat dipindahkan ke Dinas Kesehatan seperti perawat, bidan, dll padahal Dinas Kesehatan membutuhkan tenaga tersebut untuk peningkatan dan pengembangan program termasuk penguasaan program tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan pengembangan dan inovasi program karena tidak didukung tenaga Kesehatan yang akuntabel dan berkualitas.

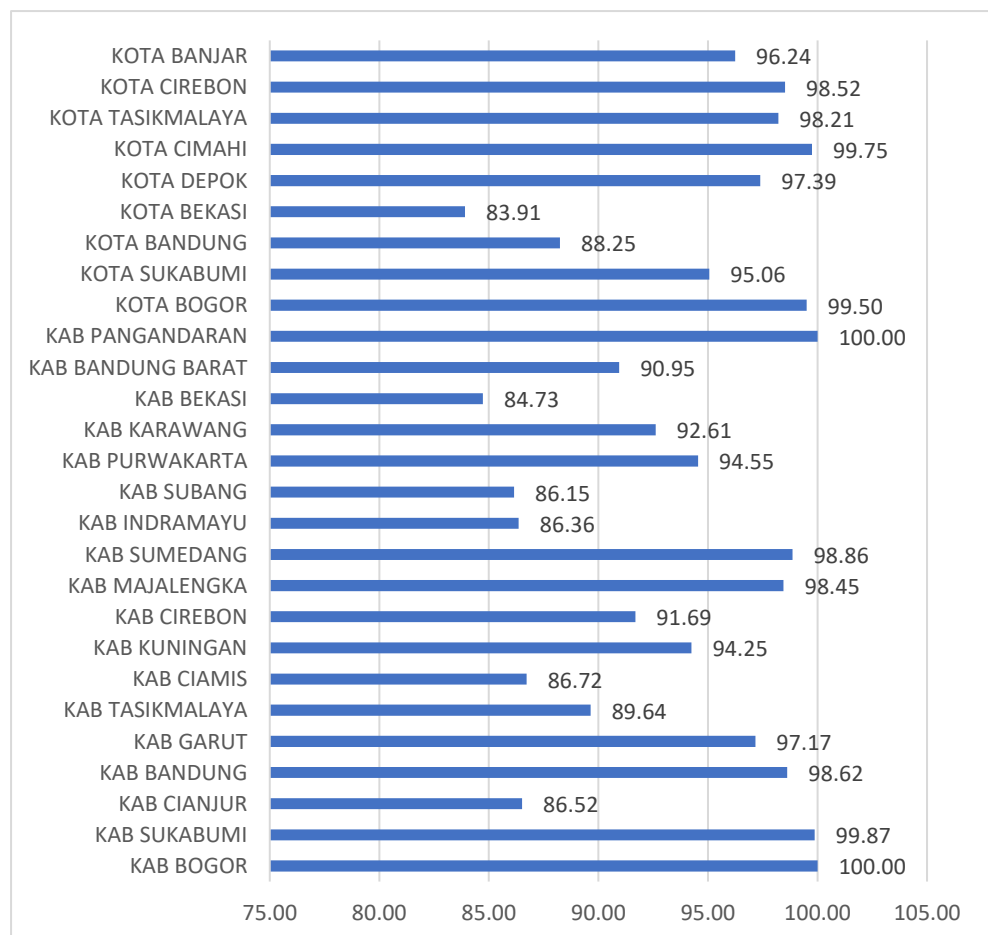
Permasalahan lainnya, terkait luasnya jumlah sasaran yang mencakup semua penduduk. Seperti usia produktif yang mencakup usia 15-59 tahun, usia Pendidikan dasar 9 tahun, dimana sasarannya bukan hanya anak sekolah formal sampai dengan SMP, tetapi termasuk anak usia Pendidikan non formal dan keagamaan seperti pesantren dan lain-lain. Hal ini selain tidak didukung dana yang memadai dan tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan sendiri, termasuk bantuan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seterusnya.

Berdasarkan cakupan SPM, maka Kabupaten Purwakarta berada pada angka 94,55, menunjukkan diatas rata-rata Jawa Barat sebesar 93,85 dan berada pada urutan kelima belas dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini menjadi



tantangan dan perlu upaya kerja keras setidaknya mencapai rata-rata Jawa Barat dan harapannya dapat mencapai 100% semua penduduk terlayani SPM. Adapun Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Pangandaran (100%) dan terendah Kota Bekasi (83,91). Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.12
Rata-Rata Capaian SPM di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, komdat.kemkes.go.id dan spm.bangda,kemdagri (data diolah) 2023



Sedangkan capaian secara rinci antar kabupaten/kota se-Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Sampai Dengan Triwulan IV
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

REKAPITULASI CAPAIAN SPM														
NO.	KABUPATEN/KOTA	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		CAPAIAN SPM TW4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
1	KAB BOGOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	KAB SUKABUMI	99.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	99.06	99.06	100.00	100.00	100.00
3	KAB CIANJUR	86.52	96.26	93.80	99.45	97.67	99.64	71.56	69.94	63.92	63.92	96.26	96.26	96.26
4	KAB BANDUNG	98.62	98.29	97.85	99.13	99.58	96.46	97.20	99.17	99.96	99.96	98.29	98.29	98.29
5	KAB GARUT	97.17	95.99	91.81	94.76	90.33	97.06	98.61	98.86	100.00	100.00	95.99	95.99	95.99
6	KAB TASIKMALAYA	89.64	99.23	95.52	98.64	98.63	91.55	70.58	87.70	75.00	75.00	99.23	99.23	99.23
7	KAB CIAMIS	86.72	77.31	88.23	87.12	93.78	81.96	70.38	92.05	83.19	83.19	77.31	77.31	77.31

REKAPITULASI CAPAIAN SPM

		0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM TW4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
8	KAB KUNINGAN	94.25	89.53	99.05	97.97	98.51	97.41	82.30	91.85	90.61	90.61	89.53	89.53	89.53
9	KAB CIREBON	91.69	97.48	95.94	95.95	96.49	97.24	84.81	87.66	86.43	86.43	97.48	97.48	97.48
10	KAB MAJALENGA	98.45	98.33	100.00	100.00	99.13	95.00	98.82	97.78	98.00	98.00	98.33	98.33	98.33
11	KAB SUMEDANG	98.86	100.00	100.00	100.00	100.00	93.60	97.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	KAB INDRAMAYU	86.36	94.82	95.12	100.00	92.57	91.67	78.25	72.72	80.99	80.99	94.82	94.82	94.82
13	KAB SUBANG	86.15	97.15	99.79	94.16	94.90	94.20	53.00	63.70	100.00	100.00	97.15	97.15	97.15
14	KAB PURWAKARTA	94.55	98.44	98.14	100.00	91.38	100.00	84.93	79.58	92.07	92.07	98.44	98.44	98.44
15	KAB KARAWANG	92.61	95.94	97.43	96.86	95.52	97.74	89.85	86.39	90.90	90.90	95.94	95.94	95.94
16	KAB BEKASI	84.73	99.58	100.00	100.00	93.68	100.00	54.49	91.42	47.52	47.52	99.58	99.58	99.58
17	KAB BANDUNG BARAT	90.95	94.81	96.06	98.56	94.43	97.64	99.52	75.76	84.00	84.00	94.81	94.81	94.81
18	KAB PANGANDARAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	KOTA BOGOR	99.50	100.00	100.00	100.00	99.28	96.76	100.00	97.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	KOTA SUKABUMI	95.06	100.00	100.00	100.00	100.00	96.62	72.04	93.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	KOTA BANDUNG	88.25	90.40	85.64	88.74	87.11	74.63	79.49	65.26	95.50	95.50	90.40	90.40	90.40
22	KOTA BEKASI	83.91	93.13	89.83	92.19	93.53	83.19	29.18	83.48	98.94	98.94	93.13	93.13	93.13
23	KOTA DEPOK	97.39	99.54	100.00	100.00	96.50	98.49	98.11	100.00	80.78	80.78	99.54	99.54	99.54



REKAPITULASI CAPAIAN SPM

		0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM TW4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
24	KOTA CIMAHI	99.75	99.69	98.93	100.00	100.00	100.00	99.16	100.00	100.00	100.00	99.69	99.69	99.69
25	KOTA TASIKMALAYA	98.21	100.00	98.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.71	82.71	100.00	100.00	100.00
26	KOTA CIREBON	98.52	96.52	99.31	100.00	100.00	99.17	91.06	96.24	100.00	100.00	96.52	96.52	96.52
27	KOTA BANJAR	96.24	99.60	97.15	95.69	97.36	97.79	92.00	75.29	100.00	100.00	99.60	99.60	99.60
TOTAL		93.85	96.74	96.95	97.75	96.68	95.47	84.92	89.11	90.73	90.73	96.74	96.74	96.74

Untuk mencapai sasaran Dinas Kesehatan maka dilaksanakan melalui 5 Program terdiri 1 program penunjang dan 4 program teknis Dinas Kesehatan dan 22 kegiatan dengan 85 sub kegiatan anggaran. Adapun capaian program-program tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2023

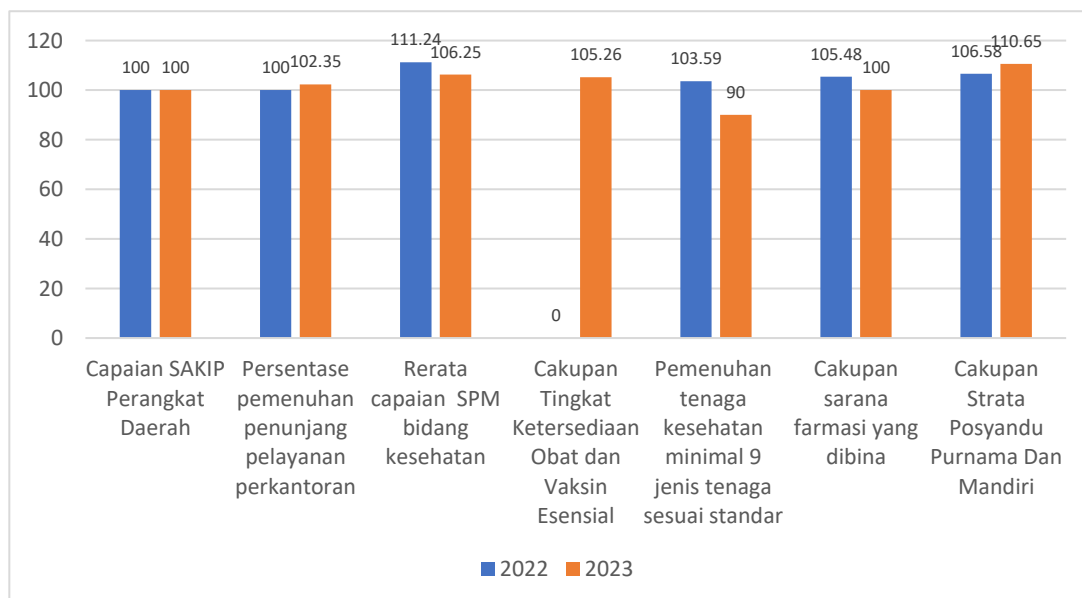
No	Program	Tolok Ukur	Capaian Program				Penanggung Jawab
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB	A	100	Sekretariat
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	85	87	102,35	Sekretariat
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	80	85	106,25	Semua Bidang, Sekretariat dan UPTD
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	Semua Bidang, Sekretariat dan UPTD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	100	90	90	Bidang SDK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	100	100	100	Bidang SDK, Bidang Kesmas



No	Program	Tolok Ukur	Capaian Program				Penanggung Jawab
			Satuan	Target	Realisasi	%	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	65.16	72	110,65	Bidang Kesmas

Berdasarkan capaian program maka terdapat program yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sedangkan 2 program dilaksanakan bidang Sumber Daya Manusia kesehatan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman serta satu program lainnya dilaksanakan oleh bidang Kesehatan Masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Selain itu Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dilaksanakan juga oleh bidang Kesehatan masyarakat yaitu pemeriksaan kualitas air dan tempat fasilitas makanan terkait hygiene dan sanitasi makanan, sedangkan pengawasan farmasi, obat dan makanan terkait zat aditif dan bahan tambahan makanan menjadi tanggung bidang Sumber Daya Manusia khususnya substansi kefarmasian. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh sekretariat. Hasil capaian kinerja Program Dinas Kesehatan semuanya mengalami peningkatan sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.13
Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2022- 2023



Selanjutnya penilaian dan evaluasi kinerja secara berjenjang sebagai berikut:

A. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Sumber daya Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.10

REALISASI KINERJA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	83,43	111,24	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	3	1	33,33	Sub Kord Supras& Alkes
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1	100	Sub Kord Supras& Alkes
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sub Kord Supras& Alkes
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	95	95	100	Kabid SDK
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid SDK
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDMK
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDMK

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid SDK
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDM
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	412	437	103,8	SubKord SDM
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDM
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid SDK
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	250	100	SubKord SDM
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	94,81	100,00	105	Kabid SDK
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	dokumen	1	1	100	SubKord Farmasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	dokumen	1	1	100	SubKord Farmasi

Berdasarkan capaian kinerja bidang sumber daya kesehatan berada pada 3 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD); Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Dimana capaian semuanya diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang sumber daya kesehatan sebanyak 6 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak satu kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah



Kabupaten/Kota; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak tiga kegiatan yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebanyak tiga kegiatan yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100% dari target.

Sub substansi sarana prasarana dan alat kesehatan melaksanakan 3 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%. Diantara kegiatan yaitu rehabilitasi dan peningkatan Laboratorium Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan alkes puskesmas.

Sub Substansi Sumber daya manusia kesehatan melaksanakan 6 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota sebanyak sub kegiatan, Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sebanyak 3 sub kegiatan dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

Sub substansi Kefarmasian melaksanakan 2 sub kegiatan pada 2 kegiatan yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 1 sub kegiatan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

B. Bidang Kesehatan Masyarakat

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.11
REALISASI KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan	Persen	95	100	105,26	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Obat dan Vaksin Esensial					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.767	17.946	101	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.959	16.609	97,9	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	78.020	71.157	91,20	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	143.607	156.842	109,22	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	108.372	82.841	76,4	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Kesehatan Kerja dan Olahraga					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	100	100,00	100	Kabid SDK
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid Kesmas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
Penerbitan Stiker Pembinaan pada	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen	65,16	72	110,65	Kabid Kesmas
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid Kesmas
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid Kesmas
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Bersih dan Sehat					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid Kesmas
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM

Berdasarkan capaian kinerja bidang kesehatan masyarakat berada pada 3 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD); Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup kesehatan masyarakat sebanyak 6 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak satu kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan



Makanan Minuman sebanyak dua kegiatan yaitu Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebanyak tiga kegiatan yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100% dari target.

Sub substansi kesehatan keluarga dan gizi melaksanakan 7 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana semuanya mencapai 100%.

Sub Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga melaksanakan 5 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 sub kegiatan; kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebanyak 1 sub kegiatan; kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

Sub Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan 4 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan, kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebanyak 1 sub kegiatan; kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:

Tabel 3.12
REALISASI KINERJA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	621.023	504.008	81,2	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70.532	67.812	96,14	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13.202	13.510	102,3	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1416	1395	98,52	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	22.799	20.695	90,8	SubKord P2 PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	Orang	24,512	21,541	87,88	SubKord P2 PM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Pelayanan Sesuai Standar					
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord Survim
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord Survim
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100	SubKord P2 PM
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	0	0	100	SubKord P2 PTM

Berdasarkan capaian kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada pada 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.



Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 0% dari target.

Sub Substansi surveilans dan imunisasi melaksanakan 1 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular melaksanakan 4 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melaksanakan 5 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Bidang Pelayanan Kesehatan

Adapun target dan realisasi kinerja bidang pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.14

REALISASI KINERJA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes Primer &Kestrad
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes Primer &Kestrad
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes rujukan & JPK
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	20	20	100	SubKord MPK
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Kabid Yankes

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	20	20	100	SubKord MPK
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes rujukan & JPK

Berdasarkan capaian kinerja bidang pelayanan kesehatan berada pada 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100 dari target.

Sub Substansi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Substansi pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Substansi mutu pelayanan kesehatan melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

E. Sekretariat

Adapun target dan realisasi kinerja Sekretariat sebagai berikut:

Tabel 3.14

REALISASI KINERJA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	Opini	BB	A	100	Sekretaris
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	85	87	102,35	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengangan dan evaluasi Kinerja Dinas Kesehatann evaluasi kinerja dinas	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	Sub Kord PI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	578	578	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi pegawai pada dinas kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum pada Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah pada Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	70	70	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI



Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat berada pada 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup sekretariat Kabupaten/Kota sebanyak 10 kegiatan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 8 kegiatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak 2 kegiatan. Hasil capaian semua kegiatan pada lingkup sekretariat realisasinya 100% dari target.

Program dan informasi melaksanakan 7 sub kegiatan pada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 7 sub kegiatan, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi sebanyak 1 sub kegiatan dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan.

Sub bagian keuangan, akunting dan aset melaksanakan 5 sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub bagian kepegawaian, umum dan hukum melaksanakan 21 sub kegiatan pada 6 kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebanyak 1 sub kegiatan; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 2 sub kegiatan, Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 8 sub kegiatan, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sebanyak 4 sub kegiatan, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 sub kegiatan, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 4 sub kegiatan.

F. UPTD

1. UPTD Puskesmas

Adapun target dan realisasi kinerja UPTD Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 3.15
REALISASI KINERJA UPTD PUSKESMAS

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100
UPTD Puskesmas Purwakarta					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1139	1139	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5072	5072	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998	998	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	39427	39427	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6659	6659	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51	51	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	430	430	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1264	1264	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
UPTD Puskesmas Marancang					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	644	644	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2831	2831	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3003	3003	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7024	7024	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4897	4897	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	48	48	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	42	42	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	715	715	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Daya Masyarakat (UKBM)					
UPTD Puskesmas Jatiluhur					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1316	1316	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4609	4609	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7806	7806	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53481	53481	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7699	7699	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	140	140	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3252	3252	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilense Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
UPTD Puskesmas Mulyamekar					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	450	450	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	429	429	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3192	3192	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15580	15580	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2632	2632	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34	34	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	219	219	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilense Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
UPTD Puskesmas Campaka					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	924	924	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1327	1327	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3499	3499	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24793	24793	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2549	2549	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50	50	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	145	145	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	468	468	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
UPTD Puskesmas Bungursari					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1232	1232	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4135	4135	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5070	5070	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13345	13345	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6336	6336	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	57	57	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	478	478	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2429	2429	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Cibatu					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	529	529	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2315	2315	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1062	1062	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18338	18338	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4022	4022	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40	40	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	310	310	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	589	589	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Daya Masyarakat (UKBM)					
Puskesmas Pasawahan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	827	827	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.626	2.886	79.59184
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6674	7374	110.4885
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28757	28757	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6549	6549	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63	63	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	311	311	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	919	919	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilense Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Pondoksalam					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	506	506	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2632	2632	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3086	3086	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17525	17525	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2960	2960	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38	38	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	263	263	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	563	563	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya					



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Wanayasa					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	386	386	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138	138	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9799	9799	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13642	13642	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5219	5219	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30	30	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	317	317	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	427	427	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
Puskesmas Kiarapedes					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1284	1284	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	204	204	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8	8	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	484	484	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	272	272	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	60	60	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	205	205	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	dokumen	10	10	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Sukatani					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1296	1296	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	454	454	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12528	12528	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	44903	44903	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7584	7584	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	98	98	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	673	673	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1296	1296	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilense Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Darangdan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1194	1194	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5631	5631	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4031	4031	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	48541	48541	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7699	7699	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	98	98	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	525	525	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12	12	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Bojong					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	890	890	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3928	3928	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6010	6010	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30824	30824	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5205	5205	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	67	67	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	280	280	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	990	990	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilance Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Plered					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1435	1435	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7748	7748	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	475	475	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	49054	49054	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8224	8224	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128	128	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	750	750	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1647	1647	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Tegalwaru					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	845	845	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2958	2958	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2231	2231	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29255	29255	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4941	4941	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	64	64	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	133	133	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50	50	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	4	4	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	4	4	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	2	2	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Daerah					
Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Maniis					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	641	641	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4334	4334	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4572	4572	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	48	48	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	69	69	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	642	642	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Orang	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Sukasari					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	267	267	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.173	1.173	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2158	2158	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9.335	6.315	67.64863

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	798	831	104.1353
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20	7	35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	215	215	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Koncara					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1026	1026	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4508	4508	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11192	11192	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	35545	35545	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6003	6003	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	49	49	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	487	487	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1026	1026	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilense Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100
Puskesmas Munjuljaya					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1449	1449	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5948	5948	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12940	12940	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50186	50186	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8476	8476	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	110	110	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	452	452	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1591	1591	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Total	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	dokumen	1	1	100

UPTD Puskesmas terdiri dari 20 Puskesmas memiliki 3 Program, 3 Kegiatan dan rata-rata memiliki 15 sub kegiatan.

2. UPTD Laboratorium Kesehatan

Adapun target dan realisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.16

REALISASI KINERJA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
UPTD Laboratorium Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

UPTD Laboratorium Kesehatan berada pada 1 sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya di kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya mencapai 100%.

3. UPTD Perbekalan Kesehatan

Adapun target dan realisasi UPTD Perbekalan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.17

REALISASI KINERJA UPTD PERBEKALAN KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target			Penanggung Jawab
				Total	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	80	85	106,25	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	81,86	109,15	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes

Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
UPTD Perbekalan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

UPTD Perbekalan Kesehatan berada pada 3 sub kegiatan di kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya mencapai 100%.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Selain indikator sasaran yang menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan. Maka realisasi anggaran juga mempunyai peranan dalam capaian keberhasilan indikator kinerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan dalam mendukung keberhasilan program pelayanan di Dinas Kesehatan. Adapun realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Rincian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	200,488,202,330	179,232,988,332	89,40	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108,937,708,246	93,984,291,519	86,27	Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429,999,400	266,897,900	62.07	Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131,999,900	75,799,900.00	57.42	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	54,500,000	27,239,300	49.98	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54,499,900	30,050,000	55.14	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	54,499,900	26,062,400	47.82	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	54,499,900	32,619,500	59.85	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39,999,800	39,775,300	99.44	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000	35,351,500.00	88.38	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56,575,820,020	53,149,390,931	93.94	Sekretaris
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56,456,501,420	53,038,610,720	93.95	Ka Sub Bag Keuangan, Akunting dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41,140,000	34,497,900	83.85	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,000,000	39,307,811.00	98.27	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13,178,600	12,946,150	98.24	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,000,000	24,028,350	96.11	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,899,900	17,789,000	89.39240901	Sekretaris
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,899,900	17,789,000.00	89.39240901	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175,704,800	126,534,000	72.01510716	Sekretaris
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155,705,000	111,750,000	72	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19,999,800	14,784,000	73.92073921	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,521,932,200	880,152,725	57.83	Sekretaris
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88,844,500	69,416,000	78.13	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	437,058,800	131,400,000	30.06	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79,999,900	29,998,000	37.50	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449,999,200	278,753,875	61.95	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179,999,800	154,687,450	85.94	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	75,000,000	61,710,000	82.28	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141,030,000	84,768,000	60.11	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70,000,000	69,419,400	99.17	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,113,624,129	398,161,000	35.75	Sekretaris
Pengadaan Mebel	400,000,000	199,012,000	49.75	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,999,800	-	-	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433,624,329	-	-	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	199,149,000	99.57	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,164,373,020	2,496,908,657	78.91	Sekretaris

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	938,953,820	573,341,302	61.06	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,225,419,200	1,923,567,355	86.44	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,931,732,000	1,165,051,300	28.57	Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312,400,000	219,977,300.00	70.42	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,269,400,000	945,074,000.00	41.64	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174,966,000	-	-	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174,966,000	-	-	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Peningkatan Pelayanan BLUD	43.004.622.777	35.483.406.006	82,51	UPTD Labkesda, UPTD Puskesmas
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Labkesda dan Puskesmas)	43.004.622.777	35.483.406.006	82,51	UPTD Labkesda, UPTD Puskesmas
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75,342,335,884	68,233,918,324	90.34	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18,172,063,482	16,323,852,990	88.92	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2,063,870,350	1,913,523,154	85.05	Kabid SDK
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200,000,000	-	-	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12,117,380,000	11,522,344,136	95.09	
Pengadaan Obat, Vaksin	800,000,000	480,446,100	60.06	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,990,813,132	2,407,539,600.00	80.50	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,574,703,502	51,491,798,734	91.02	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	331,900,000	203,660,000	61.36	Kabid Kesmas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70,000,000	67,040,000	95.77	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	215,140,000	192,858,000	89.64	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166,000,000	165,740,000	99.84	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75,000,000	69,870,000	93.16	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	111,330,000	67,214,800	60.37	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,397,266,015	1,139,049,905	81.52	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	104,880,000	104,880,000	100.00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470,000,000	439,760,000	93.57	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100,000,000	100,000,000	100.00	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	645,000,000	521,250,700	80.81	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	140,000,000	117,995,500	84.28	Kabid P2P
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	175,000,000	168,500,000	96.29	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	75,000,000	74,969,100	99.96	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,295,085,250	925,422,300	71.46	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	3,994,072,000	1,766,596,000	44.23	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	218,238,000	214,028,000	98.07	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74,500,000	74,372,000	99.83	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	70,000,000	69,086,000.00	98.69	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	136,200,000	136,200,000.00	100.00	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50,000,000	50,000,000	100.00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	40,000,000	39,812,900.00	99.53	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	171,882,500	165,164,500.00	96.09	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45,139,173,387	43,377,038,000	96.10	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,184,042,450	1,131,315,129	95.55	
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	75,000,000	60,552,300	80.74	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	49,993,900	49,423,600	98.86	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	445,590,000	275,434,300	61.81	Sekretaris
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40,000,000	39,999,900	100.00	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	205,590,000	40,583,300	19.74	
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	200,000,000	194,851,100	97.43	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149,978,900	142,832,300	95.23	Kabid Yankes
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100,000,000	93,683,800.00	93.68	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	49,978,900	49,148,500	98.34	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15,188,279,100	12,224,813,121	80.49	Kabid SDK
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	80,000,000	62,493,700	78.12	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40,000,000	26,200,000.00	65.50	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40,000,000	36,293,700	90.73	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	14,146,641,100	11,461,470,021	81.02	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40,000,000	40,000,000	100.00	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	14,066,641,100	11,389,345,021	80.97	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40,000,000	32,125,000	80.31	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	961,638,000	700,849,400	72.88	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	961,638,000	700,849,400.00	72.88	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	565,198,100	561,573,900	99.36	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	103,730,000	102,659,600	98.97	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	103,730,000	102,659,600	98.97	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	421,468,100	418,914,300	99.39	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	421,468,100	418,914,300	99.39	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000	20,000,000	100.00	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000	20,000,000	100.00	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20,000,000	20,000,000	100.00	Kabid Kesmas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20,000,000	20,000,000	100.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	454,681,000	417,410,500	91.80	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000	43,895,000	97.54	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45,000,000	43,895,000	97.54	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246,481,000	225231000	91.38	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	171,481,000	166711000	97.22	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	75,000,000	58520000	78.03	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163,200,000	148284500	90.86	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	163,200,000	148284500	90.86	

Tabel 3.19
Rincian Realisasi Anggaran UPTD Puskesmas
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
						Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Jatiluhur	3	3	17	680.077.400	670.325.312	98,57
2	Sukasari	3	3	17	604.651.000	596.094.673	98,58
3	Maniis	3	3	14	642.193.200	640.169.418	99,68
4	Tegalwaru	3	3	17	688.658.100	656.475.504	95,33
5	Plered	3	3	17	690.510.400	677.588.938	98,13
6	Sukatani	3	3	17	689.979.900	639.916.733	92,74
7	Darangdan	3	3	17	691.832.500	687.191.808	99,33
8	Bojong	3	3	17	682.461.100	662.592.530	97,09
9	Wanayasa	2	3	16	686.540.900	670.104.751	97,61
10	Kiarapedes	3	3	17	661.061.100	633.465.741	95,83
11	Pasawahan	3	3	16	684.955.900	649.591.121	94,84
12	Pondoksalam	3	3	17	642.722.700	642.573.830	99,98



No	Nama Puskesmas	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
						Anggaran (Rp)	Persentase (%)
13	Purwakarta	3	3	17	668.943.600	582.789.459	87,12
14	Munjuljaya	3	3	17	666.175.800	655.905.139	98,46
15	Koncara	3	3	17	662.825.200	635.154.181	95,83
16	Maracang	3	3	17	658.080.100	651.843.633	99,05
17	Mulyamekar	3	3	17	593.565.000	577.666.044	97,32
18	Campaka	3	3	17	677.125.700	549.784.077	81,19
19	Cibatu	3	3	17	682.945.200	654.983.602	95,91
20	Bungursari	3	3	17	683.456.500	672.253.329	98,36
	TOTAL				13.338.761.300	12.806.469.823	96,01

Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp 213.826.963.630 terdiri dari APBD Kabupaten, DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dimana realisasi anggaran sebesar 89 %. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi khususnya BOK Puskesmas dan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang belum optimal. Perubahan BOK Puskesmas adanya perubahan juknis seperti mengubah kegiatan penanganan covid menjadi insentif tenaga Kesehatan, dimana realisasinya belum optimal. Sedangkan BLUD masih dalam tahap belajar, sehingga perlu dukungan dari semua pihak, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sehingga lebih berkembang, kompetitif dan inovatif dengan tetap fokus peningkatan pelayanan yang berkualitas.

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.20
Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2023

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Dinas Kesehatan					213.826.963.630	188.224.677.187	88,03
Kesehatan					213.826.963.630	188.224.677.187	88,03
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					108.937.708.246	93.984.291.519	86,27
	Opini	B	A				
	%	85,00	87,00				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					429.999.400	266.897.900	62,07
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	2	2	100	131.999.900	75.799.900	57,42
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokume n	2	2	100	54.500.000	27.239.300	49,98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokume n	2	2	100	54.499.900	30.050.000	55,14
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokume n	2	2	100	54.499.900	26.062.400	47,82
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	laporan	1	1	100	54.499.900	32.619.500	59,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokume n	1	1	100	39.999.800	39.775.300	99,44
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokume n	1	1	100	40.000.000	35.351.500	88,38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					56.575.820.020	53.149.390.931	93,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	578	578	100	56.456.501.420	53.038.610.720	93,95



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokume n	1	1	100	41.140.000	34.497.900	83,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	40.000.000	39.307.811	98,27
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dokume n	1	1	100	13.178.600	12.946.150	98,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100	25.000.000	24.028.350	96,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19.899.900	17.789.000	89,39
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	19.899.900	17.789.000	89,39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.704.800	126.534.000	72,02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100	155.705.000	111.750.000	71,77
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	100	19.999.800	14.784.000	73,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.521.932.200	880.152.725	57,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100	88.844.500	69.416.000	78,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	2	100	437.058.800	131.400.000	30,06
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	100	79.999.900	29.998.000	37,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100	449.999.200	278.753.875	61,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	100	179.999.800	154.687.450	85,94
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	75.000.000	61.710.000	82,28



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	141.030.000	84.768.000	60,11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokume n	1	1	100	70.000.000	69.419.400	99,17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.113.624.129	398.161.000	35,75
Pengadaan Mebel	unit	20	20	100	400.000.000	199.012.000	49,75
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	20	20	100	79.999.800		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	6	100	433.624.329		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	20	20	100	200.000.000	199.149.000	99,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.164.373.020	2.496.908.657	78,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100	938.953.820	573.341.302	61,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100	2.225.419.200	1.923.567.355	86,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.931.732.000	1.165.051.300	39,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	20	20	100	312.400.000	219.977.300	70,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	2.269.400.000	945.074.000	41,64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	100	174.966.000		0,00



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	174.966.000		0,00
Peningkatan Pelayanan BLUD					43.004.622.777	35.483.406.006	82,51
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Labkesda dan Puskesmas)	Unit Kerja	21	21,00	100	43.004.622.777	35.483.406.006	82,51
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					88.450.097.184	80.807.488.147	91,36
	%	80	85,00				
	%	95	100,00				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					18.172.063.482	16.323.852.990	90
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	3	2,00	66,67	2.063.870.350	1.913.523.154	92,72
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	1		0	200.000.000		0,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1	1	100	12.117.380.000	11.522.344.136	95,09
Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	1	1,00	100	800.000.000	480.446.100	60,06
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	1	1,00	100	2.990.813.132	2.407.539.600	80,50
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					69.682.464.802	64.065.368.557	91,94



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	17.766	17.474	98,36	1.971.080.000	1.831.380.000	92,91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	16.959	16.609	97,94	70.000.000	67.040.000	95,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	16.151	16.151	100	215.140.000	192.858.000	89,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	78.020	71.157	91,20	853.600.000	851.840.000	99,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	143.607	143.607	100	419.900.000	410.970.000	97,87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	108.372	82.841	76,44	485.480.000	439.864.800	90,60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokume n	1	1	100	3.074.684.215	2.772.408.681	90,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokume n	1	1	100	328.114.000	319.360.000	97,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokume n	1	1	100	806.350.000	758.810.000	94,10
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokume n	1	1	100	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokume n	1	1	100	1.705.804.200	1.569.217.800	91,99
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokume n	1	1	100	337.002.600	254.495.500	75,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	22.799	20.906	91,70	495.400.000	488.840.000	98,68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	23.675	21.541	90,99	197.850.000	196.219.100	99,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	dokume n	1	1	100	1.296.085.250	926.422.300	71,48



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
dan/atauBerpotensi Bencana							
Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak menular	dokume n	1	1	100	6.255.122.000	3.993.339.503	63,84
Pengelolaan PelayananKesehata n pada Usia Produktif	Orang	621.023	504.008	81,16	346.638.000	338.428.000	97,63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	70.532	67.812	96,14	74.500.000	74.372.000	99,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	13.202	13.202	100	70.000.000	69.086.000	98,69
Pengelolaan PelayananKesehata n Orang denganGangguan Jiwa Berat	Orang	1.352	1.352	100	322.000.000	322.000.000	100,00
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Orang	0	0	100	50.000.000	50.000.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokume n	1	1	100	40.000.000	39.812.900	99,53
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	dokume n	1	1	100	171.882.500	165.164.500	96,09
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokume n	1	1	100	45.139.173.387	43.377.038.000	96,10
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Perbekkes)	dokume n	1	1	100	284.042.450	4.346.425.573	91,86
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	dokume n	1	1	100	900.000.000		
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Puskesmas)	dokume n	20	20	100	3.547.622.300		
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	dokume n	1	1	100	75.000.000	60.552.300	80,74
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Unit	20	20	100	49.993.900	49.423.600	98,86



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Kesehatan di Kabupaten/Kota							
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					445.590.000	275.434.300	61,81
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	40.000.000	39.999.900	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	205.590.000	40.583.300	19,74
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Unit	7	7,00	100	200.000.000	194.851.100	97,43
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	75			149.978.900	142.832.300	95,23
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokume n	1	1,00	100	100.000.000	93.683.800	93,68
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Unit	20	20,00	100	49.978.900	49.148.500	98,34
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	90,00		15.188.279.100	12.224.813.121	80,49
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					80.000.000	62.493.700	78,11713
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	40.000.000	26.200.000	65,50
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	40.000.000	36.293.700	90,73
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					14.146.641.100	11.461.470.021	81,02



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	40.000.000	40.000.000	100,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Orang	624	624,00	100	14.066.641.100	11.389.345.021	80,97
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokume n	1	1,00	100	40.000.000	32.125.000	80,31
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					961.638.000	700.849.400	72,88
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	250	250,00	100	961.638.000	700.849.400	72,88
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	%	100	100,00		565.198.100	561.573.900	99,36
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					103.730.000	102.659.600	98,97
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokume n	1	1,00	100	103.730.000	102.659.600	98,97
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh					421.468.100	418.914.300	99,39



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Industri Rumah Tangga							
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokume n	1	1,00	100	421.468.100	418.914.300	99,39
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					20.000.000	20.000.000	100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokume n	1	1,00	100	20.000.000	20.000.000	100,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					20.000.000	20.000.000	100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokume n	1	1,00	100	20.000.000	20.000.000	100,00



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Target	Realisasi	Persen tase
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	65,16	72,10		685.681.000	646.510.500	94,29
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					45.000.000	43.895.000	97,54
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokume n	1	1,00	100	45.000.000	43.895.000	97,54
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					246.481.000	225.231.000	91,38
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokume n	1	1,00	100	171.481.000	166.711.000	97,22
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	262	262,00	100	75.000.000	58.520.000	78,03
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					394.200.000	377.384.500	95,73
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	dokume n	1	1,00	100	394.200.000	377.384.500	95,73

3.6 CAPAIAN KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.21

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RPJMD PERUBAHAN 2021-2023)

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Capaian Kinerja 2023		
				2.017	2018	Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023		Realisasi Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
						Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						0		0		117.336.578.498		123.473.281.553		129.930.934.179		88.450.097.184	80.807.488.147
		1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75		80		85		
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95		95		100		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	11.484.588.257	95	12.085.232.223	100	12.717.289.868	90	15.188.279.100	12.224.813.121
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	92,21	597.635.651	95	628.891.996	100	661.783.047	100	565.198.100	561.573.900
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	63,30	224.991.173	64	236.758.211	65	249.140.666	72	685.681.000	646.510.500



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kesehatan. LAKIP tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LAKIP tahun 2023 menggunakan metoda yang berdasarkan pada pencapaian sasaran dengan menggunakan analisa dari indikator sasaran.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup kesehatan menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak periode 2018 hingga 2023. Dari hasil analisis terhadap sasaran dan program diperoleh gambaran yang menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut :

- 1) Sasaran tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana berdasarkan indikator yaitu umur harapan hidup, dimana targetnya sebesar 71,24 dengan menunggu hasil resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, dimana

target tersebut diperkirakan dapat tercapai sehingga persentasenya bisa menjadi 100%.

- 2) Sasaran Dinas Kesehatan sebagai turunan dari tujuan kesehatan yaitu **Meningkatkan akseibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas**, dimana berdasarkan indikator utama indikator persentase kematian ibu dan bayi belum mencapai target, hal ini disebabkan meskipun jumlah kasus kematian ibu sama dengan tahun lalu tetapi adanya kenaikan target dan meningkatnya jumlah kelahiran hidup, serta belum terkendalinya 3 T (tiga terlambat) dalam penanganan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yaitu terlambat dalam pengambilan keputusan tingkat rujukan sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam stadium harus segera ditangani, terlambat dalam rujukan seperti transportasi pasien ke rumah sakit, baik dari rumah pasien, maupun antar klinik, rumah sakit/bidan desa ke rumah sakit serta penanganan di rumah sakit.
- 3) Sasaran program menunjukkan terdapat 7 indikator dari 5 program. Berdasarkan 7 indikator tersebut terdapat 6 indikator yang mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar hanya mencapai 90%. Hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan pengangkatan baru untuk THL sedangkan rekrutment P3K hanya untuk alih tenaga dari non ASN menjadi ASN.
- 4) Secara umum meskipun target telah tercapai, namun masih tetap tidak berpuas diri karena masih adanya kekurangan termasuk kebutuhan untuk tenaga Kesehatan



dan non kesehatan yang kompetitif dan professional sehingga dapat mendorong perubahan capaian yang lebih tinggi sehingga dapat mempermudah mencapai tujuan organisasi Dinas Kesehatan tyaitu meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta dukungan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal bidang kesehatan.

Dari hasil analisis secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta harus diarahkan pada sebesar-besarnya upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan untuk menurunkan Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya preventif dan promotif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan tujuan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Perlu diperhatikan pula para penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya serta menjalin kemitraan dengan badan lain di tingkat nasional maupun internasional agar lebih banyak dana yang dapat dimobilisasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

Peran serta masyarakat perlu pula dikaji secara lebih mendalam tentang potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Selanjutnya perlu pula diperhatikan bahwa capaian kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan pada tahun 2021 ini, karena masih banyak yang perlu dibenahi dan harus dijadikan umpan balik bagi seluruh jajaran pegawai kesehatan di tingkat kabupaten dan jaringannya seperti puskesmas, laboratorium



kesehatan dan perbekalan kesehatan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Dinas Kesehatan yang telah kita sepakati bersama.